

PANCASILA SEBAGAI PONDASI AWAL SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Achmad Syamsudin¹⁾, Sutopo²⁾

¹Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

²Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Bocu1208@gmail.com¹⁾, sutopodrajat@gmail.com²⁾

Abstract : Pancasila is a noble legacy that was born from the reflections of its founding fathers in the basic formulation of an independent Indonesian State. Pancasila is lifted from the original values of the Indonesian people in which there are customs, culture and religion embodied in the nation's outlook on life. Pancasila is often classified as a middle ideology between the two major world ideologies that are very influential on the state. Pancasila is not communist/marxist and also not liberal/capitalist. The agreement of the Indonesian nation to make Pancasila the nation's way of life today is increasingly apprehensive due to the era of globalization. Pancasila as a weltanschauung (view of life) means that the values of Pancasila are the ethics of the common life of the Indonesian people which have been rooted since ancient times. The actualization of Pancasila is the elaboration of Pancasila values in the form of norms and their realization in the life of the nation and state.

Keywords : *Pancasila, Constitution of 1945, Constitution*

Abstrak : Pancasila adalah warisan luhur yang dilahirkan dari renungan para founding father dalam perumusan dasar Negara Indonesia merdeka. Pancasila diangkat dari nilai-nilai asli masyarakat Indonesia yang terdapat adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang terkandung pada pandangan hidup bangsa. Pancasila sering digolongkan sebagai ideologi tengah di antara dua ideologi besar dunia yang sangat berpengaruh terhadap negara. Pancasila bukan berpaham komunis/marxis dan juga bukan berpaham liberalis/kapitalis. Kesepakatan bangsa Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (way of life) dewasa ini semakin memprihatinkan karena era globalisasi. Pancasila sebagai weltanschauung (pandangan hidup) berarti nilai-nilai Pancasila merupakan etika kehidupan bersama bangsa Indonesia yang sudah mengakar sejak dulu. Aktualisasi Pancasila merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci : *Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, Ketatanegaraan*

A. Pendahuluan

Pancasila merupakan "Philosophische grondslag" yang juga dimaknai sebagai dasar negara, didalamnya terkandung nilai-nilai dan cita-cita bangsa Indonesia. Penamaan Pancasila yang dipelopori oleh Sukarno tidak bisa lepas dari sejarah lahirnya pada 1 Juni 1945 yang dalam pidatonya berjudul Lahirnya Pantja Sila di depan forum BPUPKI dalam konteks sejarah intelektual Pancasila disebut olehnya sebagai dasar falsafah.

Pidato yang disampaikan oleh Sukarno pada sidang tersebut adalah pemicu untuk merumuskan kembali dasar negara yang kemudian di respon baik oleh founding fathers dan dianggap perlu hingga terbentuklah panitia 9 yang diketuai Sukarno. Panitia ini berhasil merumuskan suatu kesepakatan yang disebut dengan "Piagam Jakarta". Pada dasarnya dalam keseluruhan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari naskah awal piagam Jakarta sebagai kenyataan politik Pancasila. 18 Agustus 1945 merupakan momentum penting hasil dari kesepakatan untuk menjaga kesatuan, maka Pancasila lahir sebagai *Philosophische grondslag* yang diakui konstitusi dengan lima sila yang terkandung di dalamnya.

Nilai-nilai kelima sila yang terkandung dalam Pancasila adalah dasar negara yang mencerminkan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, sehingga keberadaannya menjadi penting sebagai norma dasar. Sukarno dalam pidatonya menyebutkan bahwa Pancasila merupakan "*Philosophische grondslag* (Fundamental Filsafat) pikiran, jiwa dan hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang 'kekal dan abadi,'" dalam pidatonya menjelaskan bahwa Pancasila yang dirumuskan oleh pendiri bangsa sebagai dasar negara tidak diharapkan untuk berubah atau diubah, sehingga keberadaan Pancasila sebagai *Staats fundamentalnorm* bersifat abadi. Selain itu Notonagoro juga menegaskan bahwa kelima unsur Pancasila sudah ada sejak lama dan bukan hal baru bagi berdirinya bangsa Indonesia, lima unsur tersebut sebelum dan selama-lamanya telah dimiliki oleh rakyat Indonesia.

Namun dalam kenyataannya Pancasila yang disebut sebagai dasar negara tidak mendapatkan posisi khusus dalam Konstitusi. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak dalam satu pasal pun menyebutkan secara lengkap dengan bunyinya hanya saja secara implisit menyebutkan Pancasila dalam pasal 36A tentang lambang negara. Sedangkan lambang negara bisa diartikan ganda atau lebih dari satu makna. Baik dalam lingkungan yang sama maupun berbeda.

B. Metode

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisa *library research*. Penulis akan melakukan penelitian pada media buku, jurnal, majalah, koran baik offline dan online. Dimana data-data yang terkumpul dari sumber penelitian tersebut digunakan sebagai data analisis dan untuk menganalisis persoalan yang dibahas. Penulis juga melakukan pendekatan kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan, konsep dan teori yang berhubungan dengan politik dan demokrasi. Pendekatan metode kualitatif deskriptif dipilih sebagai bagian dari metode yang paling efektif dan efisien bagi penulis untuk dilakukan. Metode dalam pendekatan ini juga dirasa cukup fleksibel apabila digunakan dalam penulisan artikel ilmiah yang bertema sosial dan politik.

C. Temuan Data dan Diskusi

C.1 Sejarah Pancasila

Pancasila adalah warisan luhur yang dilahirkan dari renungan para founding father dalam perumusan dasar Negara Indonesia merdeka. Pancasila pertama kali di kemukakan oleh Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Kala itu, pemerintah Jepang memberi janji kemerdekaan pada Indonesia. Selain itu agar Indonesia mau menerima para utusan Jepang di Tanah Air sesuai mengusir tentara Belanda. Tugas BPUPKI adalah mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan Indonesia untuk merdeka dan setelah merdeka salah satunya adalah dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila ditawarkan Soekarno sebagai *Philosophische Grondslag* (dasar, filsafat, atau jiwa). Beliau mengemukakan 5 prinsip dasar negara Indonesia merdeka :

1. KEBANGSAAN (NASIONALISME)
2. INTERNASIONALISME (KEMANUSIAAN)
3. MUFAKAT (DEMOKRASI)
4. KESEJAHTERAAN SOSIAL
5. KETUHANAN YANG MAHA ESA

Lima prinsip dasar ini di namakan dengan Panca Sila, yang artinya panca 1 lima, sila artinya asas atau dasar. Jadi Pancasila adalah lima asas/dasar berdirinya Negara Indonesia. Kemudian lima diperas menjadi tiga yaitu : *socio-nationalisme*, *socio-democratie*, dan *ketuhanan*. Dan dari tiga di peras lagi menjadi satu dasar Negara yaitu : "GOTONG ROYONG"¹ Dr. Suwarno berpendapat bahwa kelima sila itu berasal dari prinsip yang terkandung dalam satu perkataan yang tulus, yakni gotong royong. Beliau mengatakan bahwa formulasi "perasan" ini hendak menghindari pihak-pihak yang tidak setuju dengan Pancasila. Maka ia menawarkan alternatif lain, yakni Trisila dan Ekasila. Gagasan dari Soekarno inilah yang menjadi cikal bakal sejarah Pancasila.

Meski Soekarno pada akhir pidatonya menegaskan lagi agar Pancasila lah yang diterima Pancasila kemudian di rumuskan oleh panitia kecil (panitia sembilan) yang beranggotakan : Ir. Soekarno (Ketua), Moh. Hatta (Wakil Ketua), Moh. Yamin, Achmad Soebarjo, A.A Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Abikusno Cokro Suyoso, Abdul Wahid Hasyim. BPUPKI berdasarkan ide dan konsep Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945, dengan beberapa penyempurnaan. Setelah beberapa hari melakukan rapat yang bersifat informal, pada tanggal 22 Juni 1945 panitia sembilan menghasilkan rumusan dasar negara yang di kenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Pancasila yang di kemukakan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di kota Jakarta, di anggap oleh rakyat Indonesia sebagai hari lahirnya Pancasila.²

Kemudian PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NEGARA Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan bersama dan perenungan jiwa oleh para pendahulu kita. Namun saat ini Pancasila mengalami deviasi dalam aktualisasi nilai-nilai nya. Deviasi pengamalan Pancasila bisa seperti penyimpangan dari makna yang sebenarnya, bahkan ada yang ingin mengganti Pancasila. Walau ada yang beberapa begitu, ada sebagian juga ingin meluruskan Pancasila sebenarnya. Pancasila sering digolongkan sebagai ideologi tengah di antara dua ideologi besar dunia yang sangat berpengaruh terhadap negara. Pancasila bukan paham komunis/marxis dan juga bukan paham liberalis/kapitalis.

Di era globalisasi saat ini banyak yang menuntut akan adanya perubahan. Begitu juga dengan bangsa Indonesia saat ini terjadi perubahan besar-besaran yang di sebabkan oleh pengaruh dari dalam maupun luar. Perubahan ini banyak di hadapi oleh masyarakat seperti moral dalam kehidupan sehari-hari dan pengetahuan akan teknologi. Untuk memhadapi hal-hal tersebut, semua pihak harus dapat menjadi warga negara yang baik dan menggunakan teknologi

¹ A. Dewantara, (2017). Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong (Indonesia dalam Kacamata Soekarno).

²A. Dewantara, (2017). Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini.

sebagaimana mestinya. Kesepakatan bangsa Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (way of life) dewasa ini semakin memprihatinkan karena era globalisasi.

Pancasila sebagai pandangan hidup, juga menentukan akan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara. Jika semua warga negara Indonesia telah melaksanakan Pancasila sebagai pandangan hidup (mempunyai moral Pancasila), ketika kita diberi amanah menjadi penyelenggara Negara tentu kita akan melaksanakan dengan sebaik mungkin. Pancasila sebagai ideologi negara artinya Pancasila merupakan dasar hukum di dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, Pancasila dijadikan norma-norma yang mengatur kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan dan kegiatan bermasyarakat.

Pancasila sebagai weltanschauung (pandangan hidup) berarti nilai-nilai Pancasila merupakan etika kehidupan bersama bangsa Indonesia yang sudah mengakar sejak dulu. Dalam kehidupan sehari-hari seperti berketuhanan yang maha Esa, bertoleransi dan menghargai sesama yang berbeda keyakinan agama, mempunyai rasa nasionalisme yang kuat, menjunjung kedaulatan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lain, mempunyai rasa kemanusiaan yang beradab, mempunyai sikap demokratis yang tidak memutlak pendapat sendiri dengan menjalankan kepentingan bersama (musyawarah), dan juga mempunyai rasa keadilan sosial yang menghargai nilai-nilai kehidupan bahwa semua itu setara.

Aktualisasi merupakan kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan aktualisasi Pancasila merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalahnya, bagaimanakah nilai-nilai Pancasila itu di aktualisasikan dalam penerapan kehidupan berbangsa dan bernegara? dan unsur nilai-nilai Pancasila manakah yang harus kita pertahankan tanpa mengenal perubahan. Moerdiono menunjukkan tiga tataran dalam ideologi Pancasila. tiga tataran yaitu :³

Pertama, nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip yang bersifat abstrak, bersifat umum, yang tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila di tetapkan oleh pendiri negara (founding father), yang sudah ada sejak dulu tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat.

Kedua, nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR.

³ W. Agus, 2011. Tugas Akhir "Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara". Yogyakarta : Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amikom

Ketiga, nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan social politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warganegara secara perseorangan.

Nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas. Jika dilihat dari segi pelaksanaannya nilai yang di anut, maka nilai praksislah yang di tentukan tegak atau tidaknya nilai dasar dan nilai instrumental. Bagia suatu ideologi, yang paling penting adalah bukti pengamallnya atau aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu ideologi dapat mempunyai rumusan yang amt ideal dan logis. Akan tetapi jika dilihat dari nilai praksisny rumusan tersebut tidak dapat di aktualisasikan, maka ideologi tersebut akan kehilangan kredibilitasnya.

Moerdiono menegaskan, bahwa tantangan terbesar bagi suatu ideologi adalah menjaga konsistensi antara nilai dasar, nilai instrumentaldan nilai praktis. Jika konsistensi ketiga nilai itu di tegakkan, maka di ideologi tidak akan ada masalah. Driyakarya menjelaskan proses pelaksanaanideologi Pancasila, dengan gambaran gerak transformasi Pancasila sebagai kategori tematis (berupa konsep, teori) menjadi kategori imperatif (berupa norma-norma) dan kategori operatif (berupa praktik hidup). Proses transformasi berjalan tanpa ada masalah apabila tidak terjadi deviasi, yang berupa pengurangan, penambahan, dan penggantian

C.2 Penerapan Nilai Pancasila

Kembali kesadaran bahwa Pancasila merupakan pemersatu bangsa yang sangat beragam ini harus segera kita tindak lanjuti dengan langkah-langkah yang nyata untuk menguatkan Pancasila ke seluruh lapisan masyarakat, terutama ganerasi muda saat ini.sebagai sebuah nilai yang abstrak, Pancasila di maknai secara berbeda-beda oleh rezim yang berkuasa. Rezim Orde lama mendefinisikan sendiri poin-poin Pancasila. Orde Baru membuat penataran P4 untuk menguatkan Pancasila, namun ini kurang berhasil karna hanya menghafal butir-butir Pancasila.

Orde Reformasi membuang banyak hal baik yang dilakukan Orde Baru, termasuk GBHN dan pengajaran Pancasila yang sangat intensif, hingga saat ini banyak muncul kesadaran yang ingin menguatkan pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang berakar dari kepribadian bangsa, maka harus menerima Pancasila sebagai dasar negara yang mengatur ketata negaraan.

Pancasila sebagai pengatur sikap/moral dan tingkah laku rakyat Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa (sila-I), dengan sesama manusia (sila-II), dengan bangsa yang satu kesatuan (sila-III), dengan kekuasaan dan pemerintah negara (sila-IV), dan dengan keadilan bersama (sila-V). Pancasila merupakan kehendak bangsa Indonesia sebagai dasar kehormatan Indonesia, yaitu sebagai dasar negara,hal ini karena sudah tertanam dalam kalbunya rakyat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan ciri khas bangsa Indonesiaberbeda dengan bangsa lain. Terdapat kemungkinan, bahwa tiap-tiap sila juga bersifat Universal yang juga di miliki bangsa lain, akan tetapi ke-5 sila yang merupakan satu kesatuan yang tidakterpisah, itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Pancasila yang dijadikan simbol-simbol saja dalam acara resmi. Ide untuk menggali kembali Pancasila hanyalah omong kosong. Kita seakan lupa bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa yang harus di junjung dan dibela. Hampir setiap hari kita melihat televisi banyak tindakan tak ber moral yang dilakukan penguasa. Banyak berita para birokrat berlomba-lomba

untuk merampas kekayaan aset bangsa, korupsi telah masuk dalam instansi pemerintah, serta budaya kolusi dan nepotisme yang merajai segala lini tanpa mengenal batasan kewajaran. Masyarakat kelas menengah ke bawah harus hidup dalam kemiskinan sedangkan wakil rakyat (kelas atas) berkuat dengan permainan politik dan usaha memperkaya diri sendiri dengan uang haram. Padahal itu tidak sesuai dengan cita-cita Pancasila. Disini kita akan melihat bagaimana pengamalan Pancasila saat ini, sesuai dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila.⁴

Sila ke-satu: Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan kepercayaan akan Tuhan yang satu Tuhan yang univeersal. Dalam beragama kita bebas menentukan apa yang kita percayai. Namun, pada kenyataannya masih bannyak umat beragama harus hidup dalam ketakutan karena serangan fisik maupun verbal dari oknum yang tidak bertoleran. Memang tidak banyak oknum-oknum tersebut, dibanding dengan orang Indonesia yang ber toleran dan cinta damai. Tuhan yang kita peercaya adalah pengasih dan penyayang, yang suka dengan kedamaian.

Kebebasan beragama di Indonesia memang di jamin Undan-Undang Dasar, namun kenyataan nya masih jauh dari harapan. Untuk itu kita harus mengamalkan sila pertama dengan, meningkatkan rasa toleransi antar umat beragama, menghargai perbedaan dalam cara berdoa, dan kita percaya bahwa Tuhan itu hanya satu. Dan itu yang dapat menyatukan kita seluruh warga negara Indonesia.

Sila ke-dua : Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dibawah ketuhanan ada kemanusiaan. Hal ini di sadari betul oleh pencetus bangsa yang menginginkan persamaan hak, tenggang rasa, dan menjunjung tinggi harkat martabat yang sama. Namun kenyataannya, ketimpangan sosial yang terjadi, yang kaya semakin kaya dan rakus yang miskin semakin terdesak dan terdorong roda kehidupan yang menggusur kelayakan hidupnya hingga dipaksa tundak pada ke tidakadilan. Penguasa semakin memperlihatkan kemewahan tanpa memandang ke bawah, sedangkan rakyat yang lapar dalam kesengsaraan.

Kemanusiaan bukan lagi prioritas lagi yang terlalu mementingkan kekayaan materi. Manusia sejatinya adalah saling mencintai. Kita sebagai mahluk sosial taka akan pernah bisa hidup sendiri. Sifat gotong royong adalah identitas bangsa yang harus kita galangkan, di hidupkan dan di amalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sila ke-tiga : Persatuan Indonesia.

Dengan implementasi sistem otonom yang dimulai sejak era reformasi ini, daerah-daerah Indonesia mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi daerah mereka. Namun, kurangnya penyediaan pembangunan membuat ketimpangan dalam pembangunan di masing-masing daerah dan masih banyak daerah yang tertinggal dalam segi ekonomi maupun pendidikan. Beberapa daerah juga menjadi korban dari kebijakan ketidakadilan, terutama dalam hal penggunaan sumber daya alam.

Hasilnya, elemen radikal dan sparatis menggunakan kekesalan masyarakat sebagai alasan untuk bergerak dan mengancam untuk memisahkan diri daari NKRI. Persatuan yang sudah lama mengikat warga Indonesia terancam, dan rentan terhadap pengaruh negaif yang bertujuan memecah belah Indonesia. Kita sebagai generasi mudaharus memegang asas Bhineka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda suku, agama, budaya, kita tetap satu kesatuan, yaitu Indonesia. Tanpa ada nya kesatuan kita tidak bisa mencapai cita-cita bangsa Indonesia.

⁴ Kaelan, 2014, Pendidikan Pancasila, Edisi revisi kesepuluh,Paradigma, Yogyakarta

Sila ke-empat: Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Rakyat Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dalam penggunaan hak politiknya. bukti paling nyata penggunaan politik adalah pemilu dan pemilihan kepala daerah. Kita memilih para calon terbaik untuk mewakili kita dari RT hingga Presiden. Semua dilakukan dengan asas demokrasi. Namun, sekarang dinodai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Politik uang, kecurangan pemilu menjadi penyakit yang tak ada obatnya. Biaya politik yang tinggi menyebabkan calon pemimpin meminjam uang kemana-mana.

Ketika terpilih, masa jabatan tidak digunakan untuk mengabdikan pada rakyat. Namun memikirkan balik modal, sehingga uang rakyat dan aset negara dikuras untuk melunasi hutang dan memperkaya diri. Untuk itu kita harus memilih wakil rakyat yang benar-benar mengabdikan pada rakyat, dan menyampaikan keluhan rakyat kepada pemerintah.

Sila ke-lima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan sosial merupakan konsep yang abstrak, secara umum kita mengartikan keadilan sosial sebagai keadaan di mana semua warga negara mendapatkan penghidupan yang layak dan kesempatan yang setara dalam mengejar aspirasi diri. Namun kenyataannya masih belum begitu, angka kemiskinan semakin tinggi, pengangguran semakin banyak dan kesenjangan sosial merupakan bahaya yang di manifestasikan oleh tindakan kekerasan dan aksi anarkis masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus bertanggung jawab atas warga negaranya, serta membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin hidup layak. Kita harus mendukung pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.

C.3 Karakteristik Negara Hukum Pancasila

Negara hukum Pancasila adalah suatu negara hukum yang bercirikan atau berlandaskan pada nilai-nilai luhur serta berlandaskan pada identitas dan karakteristik yang terdapat pada Pancasila. Karakteristik yang dimaksud yang terdapat di dalam Negara Hukum Pancasila adalah Ketuhanan, kekeluargaan, gotong royong, dan kerukunan. Pertama dalam hal Ketuhanan, negara hukum Pancasila mengakui adanya keberadaan dan kemahakuasaan Tuhan. Hal tersebut tertuang dalam pembukaan maupun pasal 29 UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 negara Indonesia mengakui bahwa negara Indonesia lahir karena adanya campur tangan dan kemahakuasaan Tuhan.

Perlu diingat bahwa kemerdekaan Negara Indonesia didapatkan dari karunia Tuhan Yang Maha Esa, bukan atas pemberian penjajah Belanda atau negara lain. Kemerdekaan Indonesia tidak mungkin terjadi bila Tuhan Yang Maha Esa tidak menghendakinya. Pada pembukaan UUD 1945 alinea III yang menyebutkan bahwa, "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Berdasarkan pengakuan atas keberadaan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan tersebut, negara hukum Pancasila wajib menjamin adanya kebebasan beragama (freedom of religion). Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan:⁵

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Kedua, negara hukum Pancasila mempunyai karakter kekeluargaan dan gotong royong. Asas kekeluargaan dalam negara hukum Pancasila tidak dapat dipisahkan dari paham negara

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

integralistik sebagaimana dinyatakan oleh Soepomo. Menurutnya kalau hendak membicarakan mengenai dasar pemerintahan Indonesia yang hendak dibangun, maka hendaknya sistem pemerintahan tersebut harus didasarkan pada staatsidee bangsa Indonesia. Selanjutnya menurut Soepomo, sistem pemerintahan Indonesia harus didasarkan pada asas kekeluargaan atau yang disebut dengan negara integralistik.

Asas kekeluargaan dalam pandangan falsafah Pancasila menunjukkan suatu pandangan dan sikap hidup bangsa Indonesia yang menentang pandangan dan sikap bangsa barat yang individualis dan liberalis. Jadi antar warga negara Indonesia hendaklah saling hormat menghormati dan saling sayang menyayangi layaknya satu keluarga. Keluarga besar yang bernam Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, adat, budaya, dan agama. Tidak patut bila antara sesama anggota keluarga ada sebuah permusuhan. Hendaknya bila ada suatu permasalahan yang terjadi hendaklah bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Asas kekeluargaan diartikan bahwa Indonesia sebagai negara persatuan yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam penjelasan umum UUD 1945, yang menyebutkan bahwa: "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya.

Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perorangan. Negara menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Sampai dengan era tahun 1970 an, ketika orang Indonesia (Jawa khususnya) dihadapkan pada konflik maka akan dipilih cara- cara penyelesaian dengan menonjolkan solidaritas sosial. Kompromi, musyawarah (conciliation) serta pendekatan lunak selalu dipandang sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan konflik sekaligus mengembalikan suasana kehidupan harmonis. Bahkan dapat dinyatakan bahwa musyawarah itu merupakan karakteristik utama dari budaya hukum Indonesia

Ketiga asas gotong royong, dalam asas ini memberikan arti bahwa Negara Pancasila mengakui gotong royong sebagai salah satu sifat masyarakat Indonesia. Gotong royong sendiri adalah saling tolong menolong dalam berbagai hal untuk mewujudkan kepentingan bersama. Gotong royong sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai contoh gotong royong masyarakat Indonesia dalam membuat jembatan, membangun jalan atau menjaga kebersihan lingkungan dan masih banyak contoh yang lainnya. Tidak berhenti hanya dalam tatanan bermasyarakat, gotong royong dalam menyumbangkan pikiran untuk kemajuan bangsa Indonesia bisa dilihat dari keterwakilan suara rakyat oleh MPR, DPR, dan DPRD dalam membuat suatu produk hukum berupa undang-undang. Indonesia diharapkan bisa menjadi bangsa yang modern, akan tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai Pancasila.

D. Kesimpulan

Pancasila adalah warisan luhur yang dilahirkan dari renungan para foundingfather dalam perumusan dasar Negara Indonesia merdeka. Pancasila pertama kali di kemukakan oleh Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Kala itu, pemerintah jepang memberi janji kemerdekaan pada indonesia. Selain itu agar indonesia mau menerima para utusan jepang di Tanah Air seusai mengusir tentara Belanda.

Tugas BPUPKI adalah mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan Indonesia untuk merdeka dan setelah merdeka salah satunya adalah dasar negara.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan bersama dan perenungan jiwa oleh para pendahulu kita. Namun saat ini Pancasila mengalami deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya. Deviasi pengamalan Pancasila bisa seperti penyimpangan dari makna yang sebenarnya, bahkan ada yang ingin mengganti Pancasila. Walau ada yang beberapa begitu, ada sebagian juga ingin meluruskan Pancasila sebenarnya. Pancasila sering digolongkan sebagai ideologi tengah di antara dua ideologi besar dunia yang sangat berpengaruh terhadap negara. Pancasila bukan berpaham komunis/marxis dan juga bukan berpaham liberalis/kapitalis.

Pancasila sebagai *weltanschauung* (pandangan hidup) berarti nilai-nilai Pancasila merupakan etika kehidupan bersama bangsa Indonesia yang sudah mengakar sejak dulu. Dalam kehidupan sehari-hari seperti berketuhanan yang maha Esa, bertoleransi dan menghargai sesama yang berbeda keyakinan agama, mempunyai rasa nasionalisme yang kuat, menjunjung kedaulatan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lain, mempunyai rasa kemanusiaan yang beradab, mempunyai sikap demokratis yang tidak memutlakan pendapat sendiri dengan menjalankan kepentingan bersama (musyawarah), dan juga mempunyai rasa keadilan sosial yang menghargai nilai-nilai kehidupan bahwa semua itu setara.

Moerdiono menunjukkan tiga tataran dalam ideologi Pancasila. Tiga tataran yaitu: ⁶Pertama, nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Kedua, nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Ketiga, nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila.

E. Daftar Kepustakaan

- Agus W., 2011. Tugas Akhir “Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Amikom Bernegara”. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Bernegara”. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer
- Dewantara A., (2017). Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong (Indonesia dalam Dewantara A., (2017). Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini. Kacamata Soekarno).
- Kaelan, 2014, Pendidikan Pancasila, Edisi revisi kesepuluh, Paradigma, Yogyakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ W. Agus, 2011. Tugas Akhir “Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amikom